



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Siaran Pers
Seminar Regional - Dili
20 Juni 2017

JSMP menyajikan temuan laporan tahunan sektor peradilan dan legislatif 2016 selama seminar regional mengenai peranan Parlemen Nasional dan Sistem Peradilan Formal kepada para Pimpinan Komunitas di Correios Dili

Pada tanggal 16 Juni 2016, JSMP merealisasikan sebuah seminar regional mengenai “Peranan Parlemen Nasional dan Aktor Peradilan dalam sistem hukum formal Timor-Leste”, di aula Correios, Kota-madya Dili.

Para peserta dalam seminar ini terdiri dari para kepala desa, perwakilan perempuan, anggota dewan desa dan para pemuka masyarakat yang mewakili 18 desa dari Kecamatan Ermera, Kotamadya Ermera, Kecamatan Remexiu, Kota Madya Aileu dan Kecamatan Maubara Kota Madya Likisa.

Total peserta yang hadir dalam seminar tersebut sebanyak 20 orang yang terdiri dari 8 orang perempuan dan 12 orang laki-laki. Seminar ini dihadiri oleh pembicara dari Parlemen Nasional, Pengadilan, Kantor Kejaksaan dan Pembela Umum dan diliput oleh media nasional.

Pembicara dari Parlemen Nasional (PN) diwakili oleh Wakil Ketua Komisi A, Bpk. Arão N. de J. da C. Amaral, Pengadilan diwakili oleh Hakim Edite Parlmira, yang membawakan topik mengenai peranan pengadilan dalam sistem hukum formal Timor-Leste, Kantor Kejaksaan Umum diwakili oleh Jaksa Angelina Saldanha yang membawakan topik mengenai peranan jaksa penuntut umum dan tantangannya dan Kantor Pengacara Umum diwakili oleh Koordinator Umum Kantor Pengacara Umum Sergio Hornai, yang membawakan topik mengenai peranan pembelaan dan tantangan-tantangannya.

“Kegiatan ini diorganisir untuk memfasilitasi komunikasi langsung antara para pimpinan masyarakat yang telah mendapatkan pelatihan sebelumnya oleh JSMP mengenai lembaga-lembaga negara termasuk institusi relevan lainnya yang memainkan peranan dalam sektor peradilan, untuk memperdalam pengetahuan mereka dan juga dapat menyampaikan pandangan, kritik, keraguan dan keprihatinan mereka secara langsung kepada perwakilan dari institusi-institusi terkait tersebut”, kata Direktur Eksekutif JSMP, Luis de Oliveira Sampaio.

Rua Beco Lakateu, Aldeia Manu fuik,
Suku Colmera, Administrativu Vera Cruz
Dili Timor Leste
PoBox: 275

Telefone: 3323883 | 77295795

www.jsmp.tl

luis@jsmp.minihub.org

Facebook: www.facebook.com/timorleste.jsmp

Twitter: @JSMPtl

Sebelum para pembicara menyampaikan topik mereka masing-masing, JSMP memulai dengan memaparkan temuan-temuannya yang didapatkan selama ini di PN dan di pengadilan-pengadilan negeri dan Pengadilan Tinggi. Ini termasuk menekankan kembali mengenai hal-hal terkait kuorum di sidang pleno di PN atau di Komisi A yang sering kali tidak terpenuhi karena masalah ketepatan waktu, masalah produktifitas, tidak hadir tanpa alasan, dan perilaku para anggota PN yang mondar-mandir dan berdiskusi sendiri selama pleno yang berdampak pada kualitas dan produktifitas kerja PN. Selain itu, JSMP juga mengangkat isu mengenai penafsiran terhadap kekebalan hukum yang tidak tepat dan dampak-dampaknya terhadap komitmen Negara untuk memastikan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dan pembarantasa korupsi. Namun demikian JSMP juga menghargai perubahan penting yang terjadi selama tahun 2016 ketika terjadinya perubahan dalam Pimpinan Ketua Parlemen Nasional.

Selain itu dalam sektor peradilan, JSMP terus menekankan masalah-masalah mengenai keterbatasan anggaran, sumber daya manusia dan infrastruktur, persidangan di pengadilan tinggi yang sering kali dilakukan secara tertutup tanpa diakses oleh masyarakat umum dan memutuskan perkara hanya melalui musyawarah dan masalah penerapan UU Perlindungan Saksi yang tidak efektif. Selain itu, JSMP juga mengangkat isu spesifik mengenai kasus-kasus kekerasan domestik yang mayoritas dihukum hanya dengan hukuman penangguhan penjara (66%) dari total kasus yang dipantau JSMP selama tahun 2016, tidak ada mekanisme kontrol yang efektif mengenai penerapan hukuman penangguhan, dan aturan perilaku; dan pengadilan lainnya yang sangat jarang menerapkan aturan tambahan atau aturan perilaku, dan persidangan yang tidak tepat waktu sehingga berdampak pada kualitas persidangan.

Sementara itu, masalah-masalah yang diangkat oleh para peserta adalah mengenai prosedur penanganan kasus pidana dan perdata di pengadilan terkait legalitas dari proses penerapan praktek-praktek kebiasaan-adat yang digunakan oleh para anggota dewan desa untuk menyelesaikan masalah di tingkat desa. Para peserta juga mendesak sosialisasi mengenai penerapan UU Pertanahan dan pengakuan atas hak-hak sebelumnya dalam undang-undang khusus mengenai kepemilikan atas barang tidak bergerak yang masih belum jelas. Selain itu para peserta juga membagikan keprihatinan mereka mengenai pelanggaran atas Aturan Internal Parlemen mengenai ketepatan waktu, tidak hadir tanpa alasan dan meminta untuk memulai sebuah proses yang tepat untuk situasi-situasi ini.

Sehubungan dengan persoalan-persoalan tersebut, pembicara dari PN menerangkan bahwa sosialisasi mengenai undang-undang adalah tanggungjawab pemerintah dan peranan PN adalah melakukan pengawasan. Pengawasan bukan hanya terhadap bangunan fisik, namun termasuk pengawasan terhadap penerapan undang-undang dan kebijakan lainnya. Sementara mengenai masalah sengketa tanah yang masih sedang terjadi dapat diselesaikan melalui Undang-Undang

Rua Beco Lakateu, Aldeia Manu fuik,
Suku Colmera, Administrativu Vera Cruz
Dili Timor Leste
PoBox: 275
Telephone: 3323883 | 77295795

www.jsmp.tl

luis@jsmp.minihub.org

Facebook: www.facebook.com/timorleste.jsmp

Twitter: @JSMPtl

Khusus untuk Benda Tak Bergerak (UU Pertanahan). Lebih lanjut anggota parlemen tersebut menerangkan bahwa untuk kasus sengketa tanah yang sedang dalam proses, diminta kepada para pimpinan masyarakat (para kepala desa) untuk menunggu Komisi Kadatral (Komisi Pertanahan) untuk menyelesaikan kasus-kasus pendudukan yang akan diselesaikan secara/melalui aturan undang-undang.

Untuk para anggota PN yang melanggar aturan mengenai ketepatan waktu, tidak hadir tanpa alasan, Arão Noe, mengatakan bahwa dalam praktek para anggota PN adalah politikus yang bekerja secara independen dan oleh karena itu lebih sulit untuk dikontrol. Namun masalah ini akan dibahas dengan para ketua fraksi parlemen agar di masa mendatang bisa dicarikan mekanisme yang cocok untuk memberikan sanksi kepada para anggota PN yang melanggar aturan main dan tidak mematuhi undang-undang internal PN.

Di lain pihak Hakim. Edit Palmira dan Kordinator Umum dari Kantor Pembela Umum, Sergio Hornai, dalam tanggapan mereka masing-masing terhadap pertanyaan para peserta mereka menekankan bahwa dalam kasus perdata pengadilan akan berfokus untuk menilai fakta-fakta yang dihadirkan oleh para pihak. Terutama para pihak didorong lebih aktif untuk mempromosikan kasus mereka.

Sehubungan dengan hak atas tanah, menurut hakim Palmira bahwa UU Barang Tidak Bergerak memberikan penghargaan dan pertimbangan kepada mereka yang telah lama menduduki tanah tersebut dan undang-undang tersebut memberikan definisi yang jelas mengenai hak untuk mendapat hak atas hak-hak terdahulu. Hakim Palmira juga menerangkan bahwa aforamentu pada masa lampau hingga saat ini dalam KUHP perdata tidak dikonversikan sebagai hak milik dan hak atas ini batas waktunya adalah 20 tahun kemudian dapat disewakan dengan pemerintah.

Sedangkan penerapan praktek-praktek kebiasaan-adat pada kasus-kasus pidana, hanya bisa digunakan untuk kasus-kasus semi publik apabila ada kesepakatan oleh kedua belah pihak. Namun jika korban ingin melanjutkan kasusnya ke pengadilan maka polisi tidak memiliki kewenangan untuk menyerahkan kasus tersebut ke otoritas lokal. Apabila diserahkan ke otoritas lokal yang terpenting adalah menyelesaikan proses tersebut sesuai aturan dan keputusan yang diambil oleh para otoritas lokal harus seimbang dengan kerugian yang ditimbulkan. Hal ini juga diperkuat oleh Kepala Kejaksaan Distrik Dili, Jaksa Angelina Saldanha.

Para peserta menyarankan agar program yang sama dapat dilakukan di tempat lain, terutama terhadap masyarakat yang tidak dapat mengakses informasi seperti ini.

Rua Beco Lakateu, Aldeia Manu fuik,
Suku Colmera, Administrativu Vera Cruz
Dili Timor Leste
PoBox: 275
Telephone: 3323883 | 77295795

www.jsmp.tl

luis@jsmp.minihub.org

Facebook: www.facebook.com/timorleste.jsmp

Twitter: @JSMPtl

Seminar tersebut ditutup dengan menyerahkan Laporan Tinjauan Umum Sektor Peradilan dan Laporan Tahunan Pemantauan Parlemen Nasional 2016 ke Wakil Ketua Komisi A PN, Ketua Kejaksaan Distrik Dili dan Kordinator Umum Kantor Pengacara Umum Timor-Leste.

Program ini dilaksanakan atas dukungan dari dana Pemerintah Australia untuk periode tahun 2016-2017.

Untuk informasi lebih jelas hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat e-mail: luis@jsmp.tl

Rua Beco Lakateu, Aldeia Manu fuik,
Suku Colmera, Administrativu Vera Cruz
Dili Timor Leste
PoBox: 275
Telefone: 3323883 | 77295795

www.jsmp.tl

luis@jsmp.minihub.org

Facebook: www.facebook.com/timorleste.jsmp

Twitter: @JSMPtl